

PENDIDIKAN ISLAM DAN DIKOTOMI ILMU

Oleh: IMADUDDIN

imduddin@inidalwa.ac.id

Abstrak

Umat Islam adalah umat yang mempunyai semangat dan motivasi yang selalu hidup dan berkembang seiring dengan perubahan struktur kehidupan yang mengitarinya. Perubahan yang mengarah pada perbaikan yang selalu memotivasi dan menyemangati umat islam tersebut berangkat dari sebuah keyakinan beragama yang sangat mendalam.

Keyakinan beragama tersebut mampu melahirkan sebuah perubahan yang tidak hanya terjadi pada individu umat islam, tetapi jauh lebih luas dari keyakinan individu tersebut yaitu menjadi sebuah perubahan kolektif yang mampu merubah sebuah peradaban dan kebudayaan masyarakat sebuah komunitas, baik kecil maupun besar bahkan sebuah negara dan benua.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Dikotomi

Umat Islam adalah umat yang mempunyai semangat dan motivasi yang selalu hidup dan berkembang seiring dengan perubahan struktur kehidupan yang mengitarinya. Perubahan yang mengarah pada perbaikan yang selalu memotivasi dan menyemangati umat islam tersebut berangkat dari sebuah keyakinan beragama yang sangat mendalam.

Keyakinan beragama tersebut mampu melahirkan sebuah perubahan yang tidak hanya terjadi pada individu umat islam, tetapi jauh lebih luas dari keyakinan individu tersebut yaitu menjadi sebuah perubahan kolektif yang mampu merubah sebuah peradaban dan kebudayaan masyarakat sebuah komunitas, baik kecil maupun besar bahkan sebuah negara dan benua.

Sebuah keprihatinan mendalam atas hal yang terjadi pada umat Islam sejak kemundurannya dalam era peradaban dunia, hingga kini pun masih terasakan, bahkan masih dianggap sebagai sebuah “kebenaran” yang wajib dipertahankan oleh sebagian kaum muslimin, yakni tentang adanya dikotomi ilmu yang berlebihan, bersifat diskriminatif dan bahkan destruktif. Disadari atau tidak, ilmu seolah dipisahkan menjadi “Ilmu Agama” dan “Ilmu Umum”. Dikotomi terhadap ilmu ini akhirnya memaksa untuk meyakini adanya sistem pendidikan agama” dan ”pendidikan umum”. Kedua sistem tersebut akhirnya dikenal dengan “pendidikan tradisional” untuk yang pertama, dan “pendidikan modern” untuk yang kedua¹.

Seiring dengan itu, berbagai istilah yang kurang sedap pun akhirnya terdengar. Misalnya, adanya fakultas agama dan fakultas umum; sekolah agama dan sekolah umum. Bahkan, dikotomi itu menghasilkan kesan bahwa “pendidikan agama” berjalan tanpa dukungan iptek, dan sebaliknya, “pendidikan umum” hadir tanpa sentuhan agama. Istilah lain untuk ini, adanya anggapan bahwa umat Islam harus mendalami ilmu agama saja sebagai tanda keshalihan, sedangkan orang yang mendalami “ilmu umum” akhirnya dianggap sebagai “penghianatan” terhadap agama dan islam abangan.

Paradigma dikotomis berlebihan terhadap ilmu ini telah menggoreskan ukiran sejarah kelam dalam dunia pendidikan Islam. Implikasi dari anggapan ini terhadap paradigma umat Islam, jelas menimbulkan konsekuensi yang tidak kecil. Umat Islam berlomba-lomba untuk menjadi “orang shalih” dengan mempelajari “ilmu agama” saja dan meninggalkan “ilmu umum”. Praktis, akibat darinya menyebabkan sedikit umat Islam yang mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta penelitian dan riset untuk melakukan penemuan baru.

Perkembangan iptek akhirnya dikuasai oleh “orang-orang Barat”, yang notabene mereka adalah orang-orang non muslim. Akhirnya, kesan yang pernah berkembang, dengan sebutan untuk umat Islam tidak lebih dari “kaum tradisional”, “kaum sarungan”, atau sebutan lain yang terkesan kuno dan

¹ Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3.

ortodok. Alih-alih terlibat untuk menciptakan dan mengembangkan temuan-temuan iptek yang baru, mengikuti dan menggunakannya saja pun belum tentu mampu.

Hal demikian jelas sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada pada zaman Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya serta beberapa generasi mulim setelahnya. Mereka sangat menghargai dan mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan, lebih antagonis lagi jika dibandingkan dengan keadaan pada saat umat Islam mengalami puncak kejayaan yang sangat luar biasa, di zaman dinasti Abbasiyah.

Di masa kejayaannya, umat Islam menguasai peradaban dunia pada saat negara-negara Barat masih berada dalam kegelapan. Negara-negara Barat umumnya masih dalam cengkeraman dogma gereja yang sangat otoriter—yang secara politis sebenarnya dalam rangka melindungi kekuasaan kekaisaran. Semua orang yang berpikir kritis, meskipun nyata-nyata hasil pemikiran ilmiah yang berguna untuk ilmu pengetahuan dan kemajuan, tetapi berbeda dengan paham yang dianut gereja, akan diberantas, bahkan tidak sedikit yang akhirnya dihukum mati karenanya. Contoh ini bisa dilihat dari Galileo yang pada tahun 1042 H/1633 M dipaksa untuk mengubah keyakinannya tentang Heliocentris karena bertentangan dengan gereja yang menganut paham geocentris².

Dalam pemerintahan dan kekuasaan Islam pada masa kejayaannya, pemerintah justru memfasilitasi transformasi ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Penerjemahan terhadap karya-karya ilmu pengetahuan Yunani dilakukan secara besar-besaran. Tokoh-tokoh besar yang memajukan ilmu pengetahuan, baik di bidang ilmu-ilmu kedokteran, sosial dan ilmu pasti muncul dari kalangan umat Islam.

² Paham Heliocentris adalah paham yang menyatakan bahwa dalam tata surya, bumi mengelilingi matahari, yakni matahari sebagai pusat peredaran. Sedangkan Geocentris menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran, planet-planet lain termasuk matahari mengelilingi bumi. Lihat Shaber Ahmed, dkk., *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, terjemah: Zetira Nadia Rahmah, (Bangil: Islamic Cultural Workshop, 1997), h. 5.

Mereka yang menjadi pelopor ilmu aljabar, kimia, kedokteran, astronomi, seni, sastra dan sebagainya. Akan tetapi, kemudian umat Islam tertimpa juga oleh hukum kelaziman kebudayaan, yaitu akulturasi atau mungkin kurang hati-hatian mereka. Mereka telah memasukkan ke dalam ilmu-ilmu yang mereka kaji, teori-teori yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang telah diuraikan oleh Al-Ghazali dalam bukunya *Tahâfut al-Falâsifah*. Akhirnya, terjadi pulalah pertentangan yang hebat di kalangan ilmuwan Islam dan tokoh agama Islam³.

Menurut Al-Ahwani, pertentangan sebenarnya berawal sejak terjadinya percampuran antara ilmu filsafat dan ilmu kalam setelah abad 6 H. Ilmu kalam menelan mentah-mentah kaidah-kaidah ilmu filsafat yang kemudian dituangkan ke dalam berbagai buku dengan nama ilmu tauhîd, yakni pembahasan problem ilmu kalam dengan menekankan pada penggunaan semantik (logika) Aristoteles sebagai metode, sama dengan metode yang ditempuh kaum filosof⁴. Sejak saat itu, berabad-abad lamanya umat Islam tidak mau mendekati ilmu filsafat yang dituduh dapat membawa kepada kekafiran dan ilhad (atheisme). Hal ini juga semakin diperparah oleh beberapa ulama yang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengharamkan ilmu, terutama ilmu filsafat, serta mengkafirkan orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Bahkan, orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya ditangkap, dipenjarakan dan disiksa, serta buku-bukunya dibakar, seperti yang dialami oleh Al-Rukn (Abd al-Salam ibn Abd al-Qadir al-Baghdadi) dan Ibn Rusyd.

Meskipun dengan kadar, maksud dan arah yang mungkin tidak persis sama, penulis juga mendapati sebagian tokoh Islam seperti Al-Syafi'i, Al-Qabisi, Al-Ghazali, Al-Zarnuji, Ibn Taimiyah dan Ibn Jama'ah, karena kecenderungannya terhadap agama, dalam ungkapan-ungkapannya tampak

³ Syahminan Zaini, *Integrasi Ilmu dan Aplikasinya Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 8-9.

⁴ Ahmad Fuad Al-Ahwani, *Filsafat Islam, Terjemahan: Pustaka Firdaus*, cet. Ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 22.

membedakan jenis, prioritas dan manfaat ilmu. Sehingga langsung atau tidak langsung, besar ataupun kecilnya jelas mempengaruhi paradigma umat Islam di zamannya, karena mereka semua adalah tokoh-tokoh agama yang sangat didengar fatwanya. Meskipun mungkin apa yang diungkapkan tidak seperti yang dipahami oleh umat Islam di kala itu. Al-Syafi'i misalnya, ia membagi ilmu menjadi dua macam: pertama, pengetahuan fiqh untuk agama, dan kedua pengetahuan Thib untuk keperluan tubuh, selain dua macam itu laksana perhiasan di dalam persidangan⁵.

Lain lagi dengan Al-Qabisi. Meskipun secara prinsip Al-Qabisi sangat berorientasi kepada kepentingan anak/siswa (*child oriented*) dalam konsep pendidikannya, akan tetapi Al-Qabisi membagi pelajaran ke dalam dua kategori, yakni: (1) pelajaran wajib dan (2) pelajaran pilihan. Pelajaran wajib, yang di dalamnya termasuk membaca dan menulis al-Qur'an, adalah pelajaran prioritas yang wajib diikuti oleh setiap siswa, sedangkan pelajaran pilihan atau tambahan seperti ilmu hitung (*hisab*), fiqh, nahwu, bahasa Arab, syair, kisah-kisah bangsa Arab serta sejarah adalah tidak wajib untuk dipelajari kecuali bagi mereka yang menginginkannya. Materi pelajaran tambahan tersebut kurang memberikan signifikansi yang urgen bagi pembentukan pribadi anak⁶.

Al-Ghazali dalam bukunya, *Ihya 'Ulûm al-Dîn*, juga mengklasifikasikan ilmu pengetahuan kepada dua macam ilmu, yakni (1) *ilmu syar'iyah*, dan (2) *ilmu ghairu syar'iyah*. Ia memandang bahwa ilmu syar'iyah adalah ilmu wajib yang tidak diragukan lagi dampak bagi penuntutnya, sedangkan ilmu ghairu syar'iyah termasuk ilmu yang diserahkan pencapaiannya kepada manusia melalui penangkapan panca inderanya, penalaran hatinya dan penghayatan hatinya.

Berbeda dengan ilmu syar'iyah yang bersifat wajib dan sudah jelas kebenarannya, kebenaran ilmu-ilmu ini bersifat relatif yang tingkat validitasnya masih sangat terbatas karena perbedaan pemaknaan dan

⁵ Suwito dan Fauzan (Ed), *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, (Bandung: angkasa, 2003), h. 42.

⁶ *Ibid*, h. 102.

penafsiran setiap individu⁷, sehingga tidak wajib mempelajarinya dan tergantung kepada minat masing-masing individu.

Masih senada dengan Al-Qabisi, Al-Zarnuji mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, ilmu fardhu ‘ain yaitu ilmu yang setiap muslim secara individual wajib mempelajarinya, seperti ilmu fiqh dan ilmu ushul (dasar-dasar agama); kedua, ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu di mana setiap umat Islam sebagai komunitas, bukan sebagai individu yang diharuskan menguasainya, seperti ilmu pengobatan, ilmu astronomi dan lain sebagainya⁸.

Ibn Taimiyah, meskipun tidak secara eksplisit membedakan hukum dan memisahkan keduanya, akan tetapi ia membedakan ilmu ke dalam dua golongan, yaitu: (1) ilmu sam’iyyah, dan (2) ilmu aqliyyah (intelektualistik). Menurutnya, ilmu sam’iyyah adalah ilmu yang mendidik, mengajar dan membimbing manusia tentang akidah, kecakapan individual dan kemasyarakatan. Adapun ilmu aqliyyah adalah ilmu yang berhubungan dengan pembinaan fisik dan akal, seperti kedokteran, matematika, fisika dan astronomi. Selanjutnya, ia lebih berpandangan integralistik terhadap kedua ilmu tersebut⁹.

Adapun Ibn Jama’ah, meskipun secara substantif ia menekankan kaitan atau integrasi dalam ilmu, akan tetapi dari segi pembagiannya ia membedakan ilmu menjadi: (1) ilmu agama dan (2) ilmu non-agama. Ilmu agama, termasuk di dalamnya ilmu kebahasaan adalah ilmu dasar yang menjadi acuan dan paradigma pengembangan disiplin ilmu lainnya. Ia pun lebih memprioritaskan kurikulum al-Qur’an daripada yang lainnya sebagai bagian dari ilmu agama¹⁰.

Bagaimanapun, terlepas dari apakah tokoh-tokoh tersebut secara prinsip memang nyata-nyata membedakan dan memisahkan kedua jenis ilmu (“ilmu

⁷ M Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali: Suatu Tinjauan Psikologik Paedagogik*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), h. 91-92.

⁸ Suwito dan Fauzan, *op. cit.*, h. 189.

⁹ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 147.

¹⁰ *Ibid.*, h. 120.

agama” dan “non-agama”) tersebut atau tidak, umat Islam pada umumnya sebagai masyarakat awam sedikit banyak akan terpengaruhi oleh fatwa-fatwa para tokoh atau ulama, padahal mungkin ulama tersebut mempunyai maksud lain, yakni hanya membedakan dan mengurutkan skala prioritasnya saja, bukan membedakannya apalagi mengharamkan salah satunya.

Penyebab lainnya, dalam sejarah Islam memang didapati bahwa dalam perjalanan pemerintahan dan politik Islam telah mengalami suatu kejadian yang memicu resistensi umat Islam terhadap “ilmu-ilmu non agama”. Kejadian-kejadian politik yang bisa diketengahkan di antaranya adalah pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun zaman dinasti Abbasiyah yang menerapkan Mihnah (ujian) bagi orang-orang yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, termasuk juga diantaranya para pemuka masyarakat. Hal ini terjadi karena khalifah Al-Ma'mun yang berpaham Mu'tazilah kemudian menjadikan paham tersebut sebagai paham resmi negara. Pada waktu itu, yang sedang hangat diperdebatkan adalah isu yang mempersoalkan apakah Al-Qur'an itu bersifat qodim (dahulu/awal) atau tidak. Istilah lainnya adalah apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan.

Akibat peristiwa Mihnah tersebut, banyak pemuka-pemuka Islam dari ahli fiqh dan hadits yang disiksa karena tidak sejalan dengan paham Al-Ma'mun yang menyatakan bahwa al-Qur'an tidak qadim atau al-Qur'an adalah makhluk. Hal ini jelas menyulut kemarahan umat Islam kala itu. Implementasi ajaran Mu'tazilah yang dipengaruhi filsafat dan bersifat rasional, telah menimbulkan peristiwa yang menyakitkan mayoritas umat Islam, sehingga mereka membenci dan menentang ilmu-ilmu yang bersifat rasional. Klimaksnya, umat Islam kemudian menjauhi dan membenci semua ilmu non agama kecuali sebagian kecil saja seperti ilmu hitung (hisab) karena diperlukan dalam ilmu faraidh (ilmu pembagian pusaka/waris)¹¹.

Di samping itu, kejadian lainnya yang bisa dianggap besar pengaruhnya adalah fatwa yang sangat keras dan destruktif dari Ibn Shalih tentang hukum mempelajari ilmu filsafat, yang kemudian menjadi pegangan penting bagi

¹¹ Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, cet. ke-6. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 19

golongan Ahl al-Sunnah. Sebelumnya, memang beberapa tokoh sudah menghujat dan menentang ilmu filsafat seperti Ibn Hazm, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, tetapi pengaruhnya tidak sekuat pengaruh fatwa Ibn Shalih¹².

Dari beberapa ungkapan tokoh-tokoh Islam yang dikemukakan tentang ilmu, baik perbedaannya, prioritasnya, bahkan sampai ada yang memisahkan keduanya secara prinsip serta kejadian-kejadian politis dalam pemerintahan Islam, maka wajar jika kemudian umat Islam melakukan resitensi terhadap ilmu-ilmu filsafat pada awalnya, yang pada akhirnya melakukan penentangan dan meninggalkan “ilmu-ilmu non-agama” secara umum. Umat Islam akhirnya lebih banyak berkonsentrasi terhadap “ilmu-ilmu agama” saja dengan meninggalkan ilmu-ilmu non agama”. Cap “berkhianat” terhadap ilmu agama diberikan serta merta kepada mereka yang mempelajari “ilmu-ilmu umum”. Kejadian ini terus berlanjut berabad-abad lamanya, hingga memasuki abad ke-20 umat Islam baru menyadari adanya sesuatu yang telah hilang dari mereka, yakni budaya mengeksplorasi ilmu pengetahuan.

Kontradiksi kondisi yang terjadi antara masa kejayaan umat Islam dengan sikap dan pandangan dikotomis terhadap ilmu sampai hari ini masih terjadi. Umat Islam masih terkesan terpinggirkan, belum bangkit seutuhnya untuk mencoba meraih kembali kejayaan yang pernah diraih. Paradigma dikotomis berlebihan terhadap ilmu di kalangan sebagian umat Islam masih cukup kuat melekat.

Dari latar belakang tersebut, penulis memandang persoalan dikotomi berlebihan terhadap ilmu dalam pendidikan Islam adalah the Key Point (kunci permasalahan) terhadap maju-mundurnya umat Islam, karena pandangan seseorang terhadap ilmu pengetahuan akan menentukan sikapnya, apakah ia akan mengutamakan, akan menganggap biasa-biasa saja, atau bahkan akan sangat tidak peduli dan meninggalkannya. Itu semua menjadi semacam ruh kehidupan bagi berkembangnya budaya dan tradisi eksplorasi ilmu pengetahuan. Jika paradigma berpikir umat Islam masih tetap terkungkung oleh adanya persepsi dikotomis

¹² Syahminan Zaini, op. cit., h. 9.

terhadap ilmu, maka kecil kemungkinan umat Islam akan kembali bangkit meraih kemajuan peradaban yang pernah dicapai generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis mencoba meneliti tentang dikotomi ilmu dan pengaruhnya dari perspektif pendidikan Islam. Penulis mencoba memaparkannya melalui pendekatan perspektif sejarah Islam (Islamic historical perspective) dengan mengetengahkan judul “Dikotomi Ilmu Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam (Dalam Perspektif Sejarah Islam)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ahmad Fuad Al-Ahwani, *Filsafat Islam*, Terjemahan: Pustaka Firdaus, cet. Ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. ke-6. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- M Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali: Suatu Tinjauan Psikologik Paedagogik*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001)
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Zetira Nadia Rahmah, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, terjemah:, (Bangil: Islamic Cultural Workshop, 1997)

Suwito dan Fauzan (Ed), Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan, (Bandung: angkasa, 2003)

Syahminan Zaini, Integrasi Ilmu dan Aplikasinya Menurut Al-Qur'an, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989)